

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dengan adanya perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi mempermudah Pemerintah Kota Surakarta dalam menjalankan dan mengembangkan program-program yang mendukung KLA, karena Pemerintah Kota Surakarta dapat memetakan permasalahan anak dengan Kebijakan KLA sebagai solusinya. Kemudian Pemerintah Kota Surakarta bermitra dengan instansi yang dekat dengan masyarakat, misalnya Kelurahan, TP PKK Kelurahan, PPT, Puskesmas Kelurahan, dan Forum Anak tingkat kelurahan, sehingga menyentuh kebutuhan masyarakat khususnya anak.

Pemkot Surakarta dalam menjadikan Kebijakannya efektif dan efisien dengan membangun kemitraan dengan *Stakeholders* terkait, efektif karena kebijakan bisa lebih tepat sasaran kepada kelompok yang membutuhkan serta memanfaatkan personel, anggaran, dan waktu secara efisien.

Ada beberapa keberhasilan yang dilakukan oleh Pemkot Surakarta menimbang dalam menjalankan birokrasi pemerintah daerah yang baik (*good local governance*) dikenal empat prinsip yaitu koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi. Dalam membangun kemitraan, Pemkot Surakarta melakukan koordinasi secara intensif terkait keberjalanan program, dimulai dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Koordinasi dilakukan agar program dapat berjalan sesuai yang telah disepakati dalam MoU serta adanya umpan balik dari Pemkot

Surakarta dengan *Stakeholders* agar setiap aktor dapat memberikan gagasan dan kritik atas keberjalanan program. Kemudian Pemkot Surakarta mengintegrasikan semua aktor jaringan sehingga menjadikan suatu kesatuan yang tersistem dalam bentuk gugus tugas. Oleh karena itu, ada kesamaan Visi-Misi dalam mewujudkan KLA, namun setiap aktor jaringan bertugas melalui caranya masing-masing. Kemudian adanya proses sinkronisasi yaitu menghubungkan setiap aktor jaringan dalam hal perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Proses sinkronisasi dilakukan agar program yang mendukung KLA dapat selaras dengan Visi-Misinya. Jadi sebelum program dijalankan, adanya pengecekan kembali secara komprehensif terkait segala keperluan yang membantu kelancaran suatu program. Kemudian dengan adanya kemitraan dalam KLA menjadikan tugas dan fungsi dari setiap aktor jaringan menjadi lebih sederhana. Dalam setiap OPD ada berbagai tupoksi yang harus dilaksanakan. Kebijakan KLA hanya menjadi salah satu dari tupoksi OPD. Jadi dengan adanya kemitraan menjadi lebih jelas tupoksi dari setiap OPD.

Pola interaksi antar aktor muncul dalam kebijakan dan kelompok sumber daya, dan pola-pola ini memperoleh tingkat keberlanjutan karena terbatasnya substitusi sumber daya. Oleh karena itu, Pemkot Surakarta mengadakan pertemuan secara berkala untuk membahas perkembangan program-program atau program-program baru yang menunjang KLA, membahas kekurangan program yang harus diperbaiki kedepannya serta mempertahankan hal positif dari program.

Desain *networking* dalam Kebijakan KLA menggunakan desain SIN (*Services Implementation Network*) karena berbasis pada kolaborasi antara berbagai anggota jaringan dalam membentuk pelayanan bagi masyarakat

khususnya anak. Dalam pelayanan terhadap masyarakat khususnya anak, Pemerintah Kota Surakarta membuat program berkolaborasi dengan OPD terkait dan *Stakeholders*. Kolaborasi seringkali terjadi diantara program organisasi yang lebih besar, Kemudian tugas utama Dinas PPPAPM termasuk di dalamnya mendorong kemitraan, perencanaan perluasan *network*, mengembangkan program-program KLA dan lain-lain. Dinas PPPAPM merangkul setiap OPD terkait dan *Stakeholders* untuk melakukan kemitraan agar program-program KLA dapat berjalan efektif dan efisien. Dinas PPPAPM bermitra dengan siapa saja sejauh memiliki tujuan yang sama dalam mewujudkan Kota Surakarta sebagai Kota Layak Anak.

5.2 SARAN

Dalam program kemitraan, seharusnya Pemkot Surakarta berfokus lebih pada program KTR, misalnya masih maraknya iklan rokok di area publik, pemutaran videotron yang isinya iklan rokok, oleh karena itu pendekatan terhadap *Stakeholders* didalamnya perlu dilakukan secara intensif dengan pengusaha rokok atau BPPKAD yang menawarkan iklan dalam bentuk videotron agar konten yang berisi iklan rokok dapat digantikan menjadi iklan yang sifatnya edukasi.

Kemudian meningkatkan hubungan interpersonal antar anggota jaringan. Pemkot Surakarta harus dapat merangkul kelompok sasaran. Dalam hal ini dinas-dinas harus dapat saling memberikan pemahaman terhadap permasalahan instansi dibawahnya seperti Puskesmas Kelurahan, Pemerintah Kelurahan, TP PKK Kelurahan, PPT, dan Forum Anak tingkat kelurahan.